BAB III

TVPRA DI ERA BARACK OBAMA

Pada tanggal 20 Januari 2009 Amerika Serikat melantik presiden ke - 44 Barack Hussein Obama. Presiden Barack Obama menjabat sebagai presiden Amerika Serikat sejak 20 Januari 2009 sampai dengan 20 Januari 2017. Barack Obama menjadi presiden kulit hitam Amerika Serikat pertama dalam sejarah.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah Amerika Serikat di lapangan, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan manusia, dan apa saja keberhasilan Amerika Serikat dalam memerangi perdagangan manusia di era presiden Barack Obama pada tahun 2009-2017.

A. Korban Perdagangan Manusia di Era Presiden Barack Obama

Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang tidak manusiawi sejak 200 tahun yang lalu dan masih terjadi sampai sekarang. Kejahatan ini terus berlanjut sampai dengan sekarang dan menjadi isu global yang hampir semua negara di dunia terkena dampak dari praktik perdagangan manusia seperti eksploitasi seksual, buruh paksa, atau bentuk eksploitasi lainnya.

Penyebutan yang umum dalam skenario perdagangan manusia biasanya menyebutkan adanya paksaan, penipuan, dan kekerasan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan. Pelaku perdagangan manusia dapat menjual korban untuk menjadi buruh paksa, eksploitasi seks, ataupun keduanya.

Pada kasus lain, pelaku perdagangan manusia mengeksploitasi korbannya dengan *sex trafficking* yang termasuk di dalamnya menjebak korbannya dengan kekerasan lalu memasukkan mereka ke dalam industri pornografi. Pada kasus lainnya pelaku perdagangan manusia melakukan kejahatannya ini dalam suatu rumah yang sering memaksa korbannya untuk melakukan hubungan seksual dan kerja paksa sekaligus. Penggunaan kekerasan atau paksaan dapat dilakukan secara fisik ataupun mental.

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa bentuk korban yang mengalami kejahatan perdagangan manusia dari berbagai bentuk perdagangan manusia seperti *force labor*(buruh paksa), *sex trafficking*(ekspoitasi seksual), *statelessness*(masalah kewarganegaraan), dan lainnya

1. *Force Labor*/Buruh Paksa

Buruh paksa merupakan masalah yang serius dan menjalar di Amerika Serikat. Dalam konvensi International Labor Organization (ILO) melarang tindakan buruh paksa, yang dimaksud dengan buruh paksa adalah tindakan mempekerjakan karyawan/buruh dengan upah yang tidak layak/jam kerja yang telah melebihi waktu.[1]

Korban dari perdagangan manusia berasal dari beragam etnis dan ras yang berbeda. Banyak dari korban perdagangan manusia diperjualbelikan lebih dari 35 negara di dunia, mereka kebanyakan dipaksa, ditipu, atau dijual dengan menggunakan kekerasan untuk dipekerjakan tidak sesuai dengan keinginan mereka di wilayah Amerika Serikat.[2] Korban perdagangan manusia ini banyak berasal dari China, Meksiko, dan Vietnam.[3] Beberapa dari korban perdagangan manusia lahir dan besar di wilayah Amerika Serikat namun dipaksa untuk melakukan perbudakan dengan kecurangan dan bersifat menipu.

[1] Center, H. R. (2014). Forced Labor In The United States. *Hidden Slaves*, h.7.

[2] Ibid, h.8.
[3] ibid

Dalam kurun waktu 2008-2013 korban buruh paksa telah diperdagangkan di kurang lebih 90 kota di Amerika Serikat.[4] Perdagangan manusia ini berkembang subur di daerah/kota yang menjadi perlintasan para komunitas imigran seperti California, Texas, Florida, New York, dan kota-kota lainnya yang menjadi rute transit pada imigran lainnya.[5] Buruh paksa banyak terdapat di lima sektor ekonomi ini di Amerika Serikat seperti prostitusi dan eksploitasi seksual (46%), buruh kasar (27%), buruh pertanian (10%), buruh pabrik (5%), pelayan hotel dan restoran (4%).[6]

Pemerintah Amerika Serikat telah menjadi pelopor dalam mengidentifikasi dan melawan segala bentuk perbudakan paksa di seluruh dunia.[7] Kebijakan TVPA 2000 mewujudkan bentuk perlawanan, pendekatan proaktif terhadap masalah perdagangan manusia dan perbudakan paksa yang:[8]

- Mengkriminalisi/menghukum pelaku perdagangan manusia yang menjadikan manusia lain untuk diekspoitasi secara seksual, dijadikan buruh paksa/perbudakan, dan bentuk perdagangan manusia yang lainnya.
- Memberikan pelayanan/bantuan sosial dan hukum kepada korban perdagangan manusia yang selamat.
- Menyediakan dana untuk mendukung perlindungan kepada korban perdagangan manusia di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia.

2. *Sex Trafficking*/Eksploitasi Seksual

International Labor Organization (ILO) memperkirakan ada sekitar 4,5 juta korban eksploitasi seksual di seluruh dunia.[9] Sementara data akurat tentang berapa banyak

[4] Ibid, h.9.
[5] ibid
[6] ibid
[7] ibid
[8] ibid
[9] Project, P. (2015). Sex Trafficking in the U.S. *A Closer Look at U.S. Citizen Victims*, h.1.

korban eksploitasi seksual di Amerika Serikat belum diketahui jumlah pastinya, namun dapat kita ketahui bahwa perempuan, anak-anak, dan laki-laki diperjualbelikan untuk kegiatan eksploitasi seksual di kota-kota di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat.[10]

Jumlah yang mengejutkan dari korban perdagangan eksploitasi seksual ini merupakan warga negara Amerika Serikat. Pada tahun 2014, ada penelitian dari *Urban Institute* tentang eksploitasi sosial yang tersembunyi di delapan kota di Amerika Serikat dan mereka memperkirakan jumlah keuntungan di bisnis ini bekisar antara $40 juta sampai dengan $300 juta tergantung dari kotanya.[11] Menurut penelitian ini seorang pekerja seks komersial dapat mengantongi $32.833 per minggunya.[12] Dengan pendapatan seperti ini maka tidak mustahil bahwa perdagangan eksploitasi seksual dapat tumbuh subur dan dengan pendapatan yang besar, eksploitasi seksual dianggap memiliki resiko yang kecil namun memberikan pendapatan yang besar.

Ada situasi dimana korban eksploitasi seksual menghadapi situasi yang sangat dramatis. Banyak korban eksploitasi seksual menjadi terlibat di bisnis ini karena mereka dipaksa atau dimanipulasi oleh seseorang untuk masuk ke dunia prostitusi.[13] Sebagian dari mereka juga dipancing dengan janji palsu tentang pekerjaan seperti menjadi model ataupun bekerja sebagai pelayan restoran.[14] Bahkan beberapa dari mereka dipaksa untuk menjadi korban dari tindakan eksploitasi seksual oleh orang tua mereka atau anggota keluarga lainnya. Mereka terlibat dalam tindakan eksploitasi seksual hanya beberapa hari, minggu, atau mungkin mereka tetap berada di situasi eksploitasi seksual selama bertahun-tahun.

---

[10] ibid
[11] Ibid, h.2.
[12] ibid
[13] ibid
[14] ibid

Banyak dari korban ini terjebak dan bahkan takut untuk keluar dari eksploitasi seksual ini karena banyak alasan. Alasan ini meliputi trauma psikologis, rasa malu, sudah terstigma sebagai psk, kecanduan obat terlarang, mendapatkan ancaman atau anggota keluarga mereka diancam apabila mereka keluar dari bisnis prostitusi ini.[15] Menurut hukum di Amerika Serikat apabila individu ini melakukan tindakan seksual karena paksaan, penipuan, dan kekerasan, atau mereka masih berusia di bawah 18 tahun maka mereka merupakan korban dari perdagangan eksploitasi seksual.[16]

Polaris telah mengidentifikasi lebih dari 6000 korban eksploitasi seksual yng melibatkan korban selamat dari eksploitasi seksual melalui layanan dari *National Human Trafficking Resource Center* (NHTRC). Dan dengan melalui penyediaan layanan yang jangka panjang dan manajemen yang melayani korban eksploitasi seksual di Washington, DC dan New Jersey.

B. Kebijakan administrasi TVPRA dibawah presiden Barack Obama

Pada tahun 2012 presiden Barack Obama mengarahkan kabinetnya untuk bekerja dua kali lipat dalam menangani kasus perdagangan manusia, kasus ini melibatkan sekitar 20 juta lebih orang di dunia, termasuk komunitas di dalam negeri.[17] Presiden Barack Obama juga membuat *President's Integracy Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons* dan beberapa anggotanya untuk melakukan tugas dan fungsinya masing-masing anggota.

1. *Excecutive Order Strengthening Protections in Federal Contracts*

[15] ibid, h.3.
[16] ibid
[17] *The White House*. (t.thn.). Dipetik March 23, 2017, dari The White House Website: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2012/09/25/fact-sheet-obama-administration-announces-efforts-combat-human-trafficking

Memperkuat peran Amerika Serikat dalam mentolelir kejahatan perdaganagan manusia dengan kontrak yang diberlakukan oleh pemerintah. Presiden Barack Obama mempermasalahkan *Excecutive Order* menguraikan larangan berhubungan dengan aktifitas yang akan berlaku kepada seluruh perusahaan daerah dan bagian dari perusahaan tersebut.[18] Ini semua membutuhkan penyesuaian dari seluruh kontrak di luar negeri baik kontrak yang besar maupun bagian dari kontrak, dan menyediakan badan-badan pemerintah negara bagian kebijakan administrasi yang mempercepat penyesuaian ini.

2. Pelatihan Untuk Mengidentifikasi Para Korban

Lembaga administrasi menyediakan pelatihan bagi korban perdagangan manusia dan petunjuk bagi pemerintah negara bagian untuk melakukan penuntutan, aparat penegakan hukum, dan hakim imigrasi.

Pemerintah juga menaruh iklan di alat transportasi publik supaya meningkatkan kesadaran dari masyarakat betapa bahayanya kejahatan perdagangan manusia ini. Melalui pelatihan ini, diharapkan para dilengkapi dengan pengetahuan untuk dapat membedakan korban dan pelaku kejahatan perdagangan manusia, dan dapat secara baik dalam memperlakukan para korban perdagangan manusia.[19]

3. Meningkatkan Sumber Daya Dana Untuk Membantu Korban Perdagangan Manusia

Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan untuk melebarkan layanan dan bantuan hukum kepada korban perdagangan manusia, dan akan bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan, dengan bantuan dari *Goldman Sach Foundation*, untuk meluncurkan bantuan dana hingga $6 juta dalam *Partnership for Freedom Innovation Awards* untuk

[18] ibid
[19] ibid

memberikan tantangan kepada komunitas lokal untuk mengembangkan bantuan yang harus diberikan kepada korban perdagangan manusia.[20]

Pemerintah juga bekerja untuk mempercepat prosedur pemberian T-Visa, yang membolehkan korban untuk tetap tinggal di Amerika Serikat dan memberikan bantuan untuk menuntut pelaku perdagangan manusia. Sebagai tambahan presiden Barack Obama memulai niatnya untuk memberikan penghargaan *Presidential Award for Extraordinary Efforts to Combat Trafficking in Persons* yang akan diberikan kepada orang yang berusaha sangat keras dalam memerangi praktik perdagangan manusia di lapangan.[21]

4. Rencana Jangka Panjang Pemerintah Amerika Serikat Untuk Tindakan di Masa Depan

PITF (*President's Interagency Task Force*) bidang pengawasan dan penindakan perdagangan manusia akan mengembangkan yang pertama kali strategi negara bagian untuk memperkuat perlindungan kepada korban perdagangan manusia.[22] Dalam upaya terkait, pusat terpadu pelayanan penyelundupan dan perdagangan manusia melakukan penilaian terhadap kasus perdagangan manusia terutama yang berada di Amerika Serikat.

ini memungkinkan untuk penegakan hukum dan penyedia layanan yang membantu para korban perdagangan manusia untuk mengirimkan sumber daya bantuan lebih efektif. Usaha ini akan dibantu oleh para ahli untuk meningkatkan fokus terhadap kejahatan perdagangan manusia tidak hanya di Amerika Serikat saja namun ke seluruh

[20] ibid
[21] ibid
[22] ibid

dunia, dan akan tetap bekerja sama agar lebih dekat dengan HSTC (*Human Smuggling and Trafficking Center*).[23]

Usaha dari pemerintah ini akan menambah usaha-usaha baru, organisasi non profits, institusi pendidikan dan yayasan untuk melawan praktik perdagangan manusia. Kunci pengumuman yang akan membantu memajukan untuk melawan praktik perdagangan manusia antara lain:[24]

1. Pembentukan *Global Business Coalition Againts Trafficking* adalah jaringan bisnis ke bisnis yang akan memobilisasi anggotanya untuk melawan praktik perdagangan manusia, termasuk melalui identifikasi dan pengembangan layanan terbaik.
2. *John Hopkins Bloomberg University School of Public Health's Crossdisciplinary* melakukan penelitian bekerja sama dengan yayasan *Goldman Sachs* dan dewan penasihat perdagangan anak, yang akan berfokus pada pencegahan perdagangan anak dan pelayanan terhadap korban perdagangan manusia
3. Asosiasi perjalanan Amerika Serikat meningkatkan sumber daya dan keahlian untuk mengarahkan kesadaran masyarakat bahaya dari perdagangan manusia dalam perjalanan dan industri pariwisata.
4. Pemerintah meluncurkan perlawanan terhadap kejahatan perdagangan manusia di universitas-unversitas untuk meningkatkan kesadara dan mengisnpirasi aktivitas dari seluruh mahasiswa dan mahasiswi dan mengembangkan inovasi pendekatan teknologi untuk melawan perdagangan manusia.
5. Meluncurkan program *Made in a Free World* untuk mengidentifikasi konsumen dan penyedia jasa perdagangan manusia, juga memutus rantai kerentanan perdagangan manusia ini, dan mempresentasikan komitmen mereka dalam melawan perdagangan manusia. Sebagai tambahan komunitas keagamaan menjadi pemimpin

[23] ibid
[24] ibid

dalam memberantas perdagangan manusia di dalam maupun di luar negeri, meningkatkan kesadaran, dan menyediakan layanan jasa bagi para korban perdagangan manusia. Ketua dari penasihat keagamaan dan kerjasama daerah sekeliling akan berfokus pada masalah perdagangan manusia dan identifikasi peluang untuk melebarkan kerjasama dengan komunitas agama dan komunitas lainnya.

6. *Department of Justice* bertemu dengan advokat, ketua dari para penegak hukum, perusahaan teknologi, dan peneliti untuk mempercepat dalam menyebarkan informasi secara efektif kepada para penegak hukum, dengan memanfaatkan internet sebagai alat untuk mencapai korban perdagangan manusia, dan mengembangkan pendekatan inovatif lainnya untuk menyediakan para anak-anak korban perdagangan manusia bantuan yang mereka butuhkan

C. Keberhasilan Presiden Barack Obama dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia

Keberhasilan presiden Barack Obama tidak terlepas dari usaha yang sudah dijelaskan seperti di sub bab sebelumnya. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 sudah banyak sekali usaha yang dilakukan presiden Barack Obama dalam melawan praktik perdagangan manusia, seperti yang sudah presiden Barack Obama sampaikan dalam pidatonya dalam *Clinton Global Initiative* dimana presiden Obama menyebutkan bahwa perdagangan manusia sudah menjadi sebuah perbudakan modern.[25]

Dalam sub bab ini penulis ingin memberi informasi keberhasilan apa saja yang sudah dicapai presiden Barack Obama dalam 8 tahun pemerintahannya. Amerika Serikat sukses dalam 8 tahun berturut-turut selalu berada dalam Tier 1. Tier 1 berarti peringkat tertinggi dalam *TIP Report* yang dikeluarkan setiap tahunnya dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat.

[25] *COUNTERING TRAFFICKING IN PERSONS*. (2016, August 9). Retrieved November 17, 2016, from COUNTERING TRAFFICKING IN PERSONS Web Site: https://www.usaid.gov/trafficking

Barack Obama mendeklarasikan bulan Januari 2013 sebagai hari pencegahan perdagangan dan perbudakan manusia. Deklarasi ini diharapkan dapat memulai untuk meningkatkan kesadaran terhadap kejahatan perdagangan manusia baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di seluruh dunia jutaan laki-laki, wanita, dan anak-anak menjadi korban dari perdagangan manusia. Mereka merupakan korban dari perdagangan manusia yang di era ini yang berubah menjadi perbudakan modern.[26]

Berikut ini merupakan bentuk keberhasilan presiden Barack Obama dalam berbagai aspek:[27]

1. Bidang Hukum

a. Department of Justice Amerika Serikat melanjutkan untuk mengembalikan hasil penuntutan. Pada tahun 2016, *Department of Justice* mendata ada sekitar 241 penuntutan terhadap pelaku perdagangan manusia, memutuskan kasus 531 orang terdakwa terbukti melakukan kejahatan perdagangan manusia. Di tahun 2016 juga *Department of Justice* memutus untuk menuntut 439 terdakwa perdagangan manusia.

b. Pada tahun 2016, FBI menginvestigasi 1894 kasus termasuk di dalam negeri dan perdagangan manusia internasional yang korbannya orang dewasa dan remaja untuk melakukan pekerjaan buruh paksa dan seks komersial. Sebagai tambahan *Department of Homeland Security* membuka 1025 kasus perdagangan manusia dan mengidentifikasi 435 korban perdagangan manusia.

---

[26] *Global Initiative to Fight Human Trafficking*. (t.thn.). Dipetik March 25, 2017, dari Global Initiative to Fight Human Trafficking Website: http://www.ungift.org/knowledgehub/stories/January2013/us-president-barack-obama-declares-january-2013-national-slavery-and-human-trafficking-prevention-month.html

[27] *Obama White House*. (t.thn.). Dipetik March 26, 2017, dari Obama White House Website: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/10/24/fact-sheet-building-lasting-effort-end-modern-slavery

c. FBI sekarang mengoperasikan 74 satuan tugas yang mengurusi perdagangan anak dan merupakan bagian dari 100 satuan tugas lainnya dan kelompok di luar negeri yang berkolaborasi untuk memberantas perdagangan manusia.

d. Department of Justice juga menghadiahkan $15,8 juta untuk mendanai kerjasama multi disiplin dari *Enhanced Collaborative Model* (ECM) yang merupakan satuan tugas di seluruh Amerika Serikat. Satuan tugas *Enhanced Collaborative Model* terdiri dari perwakilan negara bagian, pemerintah pusat, aparat penegak hukum, perwakilan buruh, jaksa penuntut, badan pelayanan korban perdagangan manusia, dan para ahli lainnya.

e. Hukum anti diskriminasi di dukung oleh komisi kesempatan kerja yang sama yang merupakan bagian dari pertarungan melawan perdagangan manusia. Pada tahun 2015, EEOC (*Equal Employment Oportunity Commision*) meresmikan dua payung hukum termasuk ratusan korban perdagangan manusia dari negara asalnya dan buruh paksa.

f. *Justice and Homeland Security Department* melanjutkan untuk berkolaborasi dengan penegak hukum negara Meksiko melalui kerjasama bilateral Amerika Meksiko untuk memberantas perdagangan manusia. Pada bulan Juni 2016 lima orang terdakwa dari Meksiko terbukti di wilayah Amerika Serikat karena kedapatan melakukan perdagangan seks dan dikembalikan ke negara asalnya.

g. Komunitas para ahli sedang merencanakan yang pertama kali *National Intelligence Estimate* (NIE) dalam perdagangan manusia secara global. Kelompok ini akan melihat dampak dari konflik dan krisis dari perdagangan manusia, juga termasuk peningkatan jumlah pelaku perdagangan manusia. NIE akan mengeluarkan laporan saat transisi pergantian presiden.

2. Pelayanan Terhadap Korban

a. Pada tahun 2016 *Department of Health and Human Services* menyediakan lebih dari $20 juta untuk mendanai kelompok berbasis organisasi untuk membantu korban perdagangan manusia. *Grantees* melayani lebih dari 2.378 korban perdagangan manusia dan anggota keluarga melalui jaringan organisasi yang tersebar di 241 titik di 39 negara bagian. Ini mewakili peningkatan 40% bantuan terhadap korban perdagangan manusia dari tahun kemarin.

b. Sebagai tambahan, pada tahun 2016, Department Health and Human Services mensertifikasi 444 orang dewasa dan membantu 340 korban perdagangan manusia yang berasal dari luar negeri, hampir tiga kali lipat dari jumlah korban yang terhubung ke Department health and Human Services semenjak kebijakan ini dimulai.

c. Pada bulan September, *Department of Justice* menghadiahi lebih dari $49 juta untuk mendukung pendanaan penelitian anti perdagangan manusia. Melalui hadiah ini, penyedia layanan sedang membangun multi-disiplin kemitraan yang menyediakan berbagai layanan bagi korban perdagangan manusia, meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan anti perdagangan manusia dan para ahli melalui pelatihan dan bantuan secara tehnik, dan melebarkan bantuan hukum kepada para korban perdagangan manusia.

d. *Department of Labor*, *Health dan Human Services*, dan *Justice* sedang berkolaborasi untuk mengidentifikasi program layanan di Miami dan New York yang para korban perdagangan manusia dapak akses dan mengembangkan fokus pelatihan kerja antara penyedia layanan korban perdagangan manusia dan sumber daya yang ada di masyarakat.

e. *Department of the Interior* bekerja sama dengan penegakan hukum adat untuk membentuk hukum adat tentang satuan tugas larangan perdagangan manusia yang pertama. Satuan tugas ini bekerja sama dengan penegak hukum adat dan pengadilan,

kejaksaaan negara bagian, kejaksaan pemerintah pusat, penyedia layanan terhadap korban, gerakan stop kekerasan terhadap wanita, dan NGO

f. Pada bulan Maret 2016, sekretasis negara mempermasalahkan standar wajib baru untuk semua karyawan di bawah kepala misi otoritas yang mempekerjakan pekerja rumah tangga pribadi. Regulasi ini membutuhkan tambahan perlindungan kontrak untuk membantu meyakinkan mereka yang mewakili Amerika Serikat di luar negeri mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh masyarakat internasional.

g. Imigrasi dan bea cukai memperbaharui lanjutan kehadiran direktif untuk membuat lanjutan kehadiran status dua tahun di Amerika Serikat untuk korban perdagangan manusia yang bukan warga negara Amerika Serikat, peraturan ini terbarukan secara bertahap hingga dua tahun. *Continued Presence* merupakan status imigrasi sementara yang memungkinkan korban perdagangan manusia untuk tetap tinggal di Amerika Serikat selama penyidikan kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Memperluas status ini untuk dua tahun membantu memberikan stabilitas korban perdagangan manusia sementara mengurangi beban administratif terhadap korban perdagangan manusia, penyedia layanan bantuan terhadap korban, dan pemerintah Amerika Serikat.

3. Meningkatkan Kesadaran Publik

a. Pada tahun 2016, *Department of Homeland Security* membuat acara *Blue Campaign* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya perdagangan manusia serta membuat poster tentang “apa itu perdagangan manusia” dan infografis tentang bahayanya perdagangan manusia dalam berbagai bahasa.

b. *The Blue Campaign* mengadakan perjanjian yang belum pernah diadakan dengan pemerintah dan non pemerintah untuk lebih berkolaborasi dalam meningkatkan kesadaran dan memerangi perdagangan manusia, termasuk kegiatan formal dengan

kota Los Angeles, kota Houston, asosiasi penginapan California, kantor walikota Washington D.C. bagian hak asasi manusia, asosiasi kesehatan masyarakat negara bagian North Dakota, dan kantor kejaksaan agung negara bagian Virginia.

c. *Department of Justice* merilis "wajah perdagangan manusia" data ini merupakan serangkaian video, panduan diskusi, rangkaian fakta, dan poster. Data ini dapat digunakan oleh penyedia layanan bantuan bagi korban perdagangan manusia, aparat penegakan hukum, jaksa, dan pemangku kepentingan lainnya. Data ini juga termasuk informasi tentang perdagangan seks dan buruh paksa, pendekatan multidisiplin untuk melayani korban perdagangan manusia, bantuan hukum kepada para korban, dan testimoni dari korban yang selamat dari perdagangan manusia.

d. *Department of Transportation and Homeland Security* mengadakan acara tahunan tentang perdagangan manusia. Acara ini juga mengadakan pelatihan bagi 70.000 karyawan maskapai penerbangan melalui *Blue Lighting Iitiative*. Presiden menandatangani amandemen peraturan penerbangan pada Juli 2016. Peraturan ini meliputi persyaratan maskapai penerbangan untuk melatih pramugari tentang perdagangan manusia, cara melaporkan perdagangan manusia, dan transportasi darat dan laut dalam negeri untuk mengadopsi peraturan ini. Semua alat trasnportasi di darat, laut, dan udara akan tergabung dalam kelompok transportasi anti perdagangan manusia.

e. Pada tahun 2016, *Department of Education* menyediakan pelatihan kepada pada pengawas, guru, penasihat, badan pengawas tunawisma, dan NGO tentang bagaimana perdagangan manusia memiliki hubungan mengajar bagi pendidik dan belajar bagi para siswa, dan penting bagi sekolah untuk menunjukan ini. Pendidikan mendorong sekolah untuk menanamkan perdagangan manusia karena kejahatan perdaganagan manusia sudah menjadi kejahatan berat yang menjadi sorotan dunia. Maka dari itu

pendidikan memegang peranan penting untuk meminimalisir kejahatan perdagangan manusia.

Dapat disimpulkan bahwa di pemerintahan presiden Barack Obama dua periode pada tahun 2009-2017, Amerika Serikat sudah melakukan banyak upaya untuk memerangi perdagangan manusia dari aspek hukum, pendidikan, transportasi, dan lainnya sudah banyak mengalami perubahan. Pelayanan terhadap korban perdagangan manusia juga banyak mengalami peningkatan seperti adanya pelatihan bagi para petugas imigrasi dan bea cukai.

Penuntutan dan hukuman terhadap para pelaku perdagangan manusia juga mengalami perbaikan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti pelaku perdagangan manusia mengalami hukuman yang lebih berat. Pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian juga memiliki kerja sama yang lebih baik dari sebelumnya.